

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KAB/KOTA SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh :

ROVA LUARTA PUTRA

1103450/2011

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

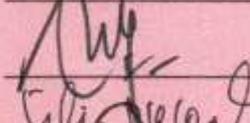
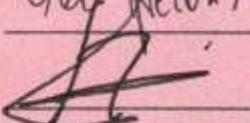
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KAB/KOTA SUMATERA BARAT**

Nama : Rova Luarta Putra
NIM/BP : 1103450 / 2011
Keahlian : Ekonomi Publik
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2015

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr. Hasdi Aimon, M.Si	
2.	Sekretaris	: Mike Triani, SE, M.M	
3.	Anggota	: Selli Nelonda, SE, M.Sc	
4.	Anggota	: Drs. Alianis, M.S	

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

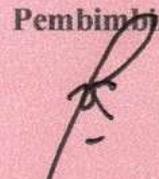
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KAB/KOTA SUMATERA BARAT**

Nama : Rova Luarta Putra
NIM/BP : 1103450 / 2011
Keahlian : Ekonomi Publik
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

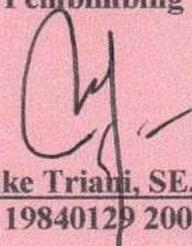
Padang, Agustus 2015

Disetujui Oleh:

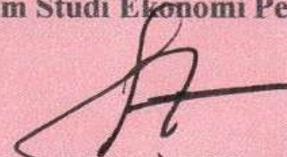
Pembimbing I


Dr. Hasdi Aimon, M.Si
NIP: 19550505 197903 1 010

Pembimbing II


Mike Triani, SE, M.M
NIP: 19840129 200912 2 002

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan


Drs. Ali Anis, M.S
NIP: 19591129 198602 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rova Luarta Putra
Nim / BP : 1103450 / 2011
Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Padi, 08 Juni 1993
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Polonia, Gang Blank Bintang No. 16
No. HP / Telpn : 081947594851
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis / skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (serjana), baik di Universitas Negeri Padang Maupun di Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan hasil rumusan dan gagasan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama dan pengarang dan di cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2015
Yang menyatakan



Rova Luarta Putra
Nim/Bp. 1103450/2011

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

(Studi Empiris Pada Seluruh Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat)

Rova Luarta Putra

**Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Padang
Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : Rova230@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengathui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi; (2) untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi; dan (3) untuk mengatahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Peneletian ini dilakukan pada seluruuh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu Metode Regresi Panel (*Pooled Analysis*).variable dependen dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan PAD perkapita, Dana Alokasi Umum di ukur dengan DAU perkapita dan Dana Alokasi Khusus juga di ukur dengan DAK perkapita.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonom, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatigf terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Hasdi Aimon, MS selaku pembimbing I dan Ibu Mike Triani SE, MM selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. H. Yanuar Kiram selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Alianis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi .
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

6. Teristimewa kepada Orang Tua penulis yaitu Nurjannah selaku ibu, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segimoril, materi kepada penulis, dan Nasrul Selaku Ayah yang menjadi semangat dan panutan dalam hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..
7. Bapak Dr. H. Hasdi Aimon, M.si yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan terutama dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Ibu Mike Triani, SE, MM yang telah membimbing penulis dan memberikan dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Untuk sahabat-sahabat Rahma Yulia Fitri, SE, Adek Edwar, Dicky Rustam, Bayu Yahya, Zil Makmur, Dega Putra, Ananta Wonianto MW, Alfajri Yoni, Risa Mayang Sari, Alven Novriza, dan sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan do'anya selama masa studi dan untuk terselsainya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Padang , Juli 2015

Penulis,

Rova Luarta Putra

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Mamfaat penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	14
1. Pertumbuhan Ekonomi	14
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
3. Dana Alokasi Umum (DAU)	30
4. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Hubungan Antar Variabel.....	37
D. Kerangka Konseptual dan Hipotesis	39
BAB III METODEDELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
1. Populasi Penelitian.....	41
2. Sampel Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Defenisi Operasional	43
F. Metode Analisis Data	44

1. Analisis Deskriptif	44
2. Analisis Induktif.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	54
2. Deskriptif Variabel	56
3. Analisis Induktif	67
a. Analisis Model Reggresi Panel.....	67
1) Uji Chow	67
2) Uji Hausmant	68
3) Model Reggresi Panel.....	69
4) Uji Asumsi Klasik	71
5) Koefisien Determinasi R^2	74
6) Pengujian Hipotesis	75
a) Uji F (Simultan).....	75
b) Uji t (Parsial).....	76
B. Pembahasan	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

I.1	Tabel PDRB harga konstan perkapita tahun 200 dan laju pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Sumatera Barat dari tahun 2009-2013	2
I.2	Tabel PAD perkipita dan laju pertumbuhannya seluruh kab/kota sumatera barat dari tahun 2009-2013	4
I.3	Tabel laju pertumbuhan DAU dan laju pertumbuhan ekonomi kab/kota sumatera barat dari tahun 2009-2013	7
I.4	Tabel laju pertumbuhan DAK dan laju pertumbuhan ekonomi kab/kota di sumatera barat dari tahun 2009-2013	9
IV.1	Tabel deskriptif data perkembangan pertumbuhan ekonomi kab/kota sumatera barat	56
IV.2	Tabel deskriptif data perkembangan PAD seluruh kab/kota di sumatera barat tahun 2009 - 2013	59
IV.3	Tabel deskriptif data perkembangan DAU kab/kota di sumatera barat	62
IV.4	Tabel deskriptif data perkembangan DAK kab/kota di sumatera barat	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perpotongan Keynesian.....	14
Gambar 2. Kerangka Konseptual.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Product Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu di dalam suatu negara. Meskipun telah digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi nasional, PDB masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan suatu daerah secara individu. Untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pertumbuhannya indikator yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan output yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah, memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah. Berikut merupakan data perkembangan Pruduk Domestik Bruto (PDRB) kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat.

Tabel I.1
PDRB Konstan Perkapita Tahun 2000 dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kab/Kota di Sumatera Barat dari Tahun 2009 – 2013.

NO	NAMA DAERAH	PDRB ADHK Perkapita (Rp)					Rata-rata	Laju Pertumbuhan				rata-rata
		2009	2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	
1	Kab. Agam	6.816.476	7.203.652	7.578.962	8.095.848	8.610.744	7.423.735	5,7%	5,2%	6,8%	6,4%	6,0%
2	Kab. Dharmasraya	5.134.967	5.685.787	5.874.694	6.225.986	6.472.590	5.730.359	10,7%	3,3%	6,0%	4,0%	6,0%
3	Kab. Pasaman Barat	6.950.593	7.414.756	7.890.784	8.401.317	8.950.764	7.664.363	6,7%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%
4	Kab. Solok Selatan	3.983.100	4.250.000	4.650.000	3.540.000	3.765.144	4.105.775	6,7%	9,4%	-23,9%	6,4%	-0,3%
5	Kab. Limapuluh Kota	7.592.374	7.935.442	8.333.537	8.764.980	9.203.667	8.156.583	4,5%	5,0%	5,2%	5,0%	4,9%
6	Kab. Solok	5.309.180	5.641.535	5.980.591	6.354.976	6.754.704	5.821.571	6,3%	6,0%	6,3%	6,3%	6,2%
7	Kab. Pasaman	7.478.015	8.047.662	8.847.698	9.660.733	10.550.256	8.508.527	7,6%	9,9%	9,2%	9,2%	9,0%
8	Kab. Sijunjung	5.225.834	5.534.407	5.864.584	6.218.804	6.600.016	5.710.907	5,9%	6,0%	6,0%	6,1%	6,0%
9	Kab. Padang Pariaman	7.132.112	7.400.119	7.733.027	8.147.690	8.691.141	7.603.237	3,8%	4,5%	5,4%	6,7%	5,1%
10	Kab. Tanah Datar	7.276.868	7.661.087	8.080.915	8.505.163	8.973.797	7.881.008	5,3%	5,5%	5,2%	5,5%	5,4%
11	Kab. Pesisir Selatan	4.557.336	4.754.903	4.956.801	5.153.228	5.444.901	4.855.567	4,3%	4,2%	4,0%	5,7%	4,6%
12	Kab. Kep Mentawai	6.708.095	6.946.226	7.060.646	7.249.203	7.479.413	6.991.043	3,5%	1,6%	2,7%	3,2%	2,8%
	Rata-rata Kabupaten	6.180.413	6.539.631	6.904.353	7.193.161	7.624.761	6.704.389	5,9%	5,6%	3,3%	5,9%	5,2%
13	Kota Payakumbuh	7.134.430	7.450.353	7.265.199	7.693.099	7.954.591	7.385.770	4,4%	-2,5%	5,9%	3,4%	2,8%
14	Kota Padang	13.777.236	14.405.647	15.092.830	15.962.530	16.558.352	14.809.561	4,6%	4,8%	5,8%	3,7%	4,7%
15	Kota Bukit Tinggi	8.553.374	8.765.859	9.101.996	9.502.618	9.907.280	8.980.962	2,5%	3,8%	4,4%	4,3%	3,7%
16	Kota Solok	8.891.861	8.879.150	9.305.654	9.724.913	10.347.307	9.200.395	-0,1%	4,8%	4,5%	6,4%	3,9%
17	Kota Padang Panjang	7.230.755	8.431.506	8.813.911	9.235.774	9.660.411	8.427.987	4,1%	4,5%	4,8%	4,6%	4,6%
18	Kota Pariaman	8.330.050	8.628.260	9.024.210	9.448.970	9.891.500	8.857.873	3,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,4%
19	Kota Sawahlunto	7.542.865	7.947.668	8.259.206	8.050.580	9.506.014	7.950.080	5,4%	3,9%	-2,5%	18,1%	6,2%
	Rata-rata Kota	8780082	9215492	9551858	9945498	10546494	9.373.232	5,3%	3,4%	3,9%	6,4%	4,5%

Dari data perkembangan PDRB Kab/kota dari tahun 2009 sampai dengan 2013 pada tabel I.1, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di kab/kota provinsi Sumatera Barat cenderung berfluktuasi. Apabila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonominya, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu sebesar 5,2%. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5,2% bukan berarti semua kabupaten di Sumatera Barat mampu memperoleh rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut. Terdapat beberapa daerah

yang rata-rata laju pertumbuhan ekonominya berada dibawah nilai rata-rata laju pertumbuhan kabupaten yaitu Kab. Kepulauan Mentawai dan kab. Solok Selatan.

Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit terutama kab. Kep Mentawai dan kab. Solok Selatan maka akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula

Dari tabel I.1 tersebut, juga dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Dari data tersebut terdapat bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kota yaitu sebesar 4,5%. Kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu kota Padang. Dimana kota Padang merupakan Pusat kota Sumatera Barat yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh akan tinggi pula.

Dari penjelasan diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa antara kabupaten dan kota, baik lihat dari angka PDRBnya maupun laju pertumbuhannya mangindikasikan adanya ketimpangan antara kabupaten dan kota. Secara umum ketimpangan tersebut disebabkan oleh besarnya sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pendapatan suatu daerah besumber dari diantaranya yaitu Pendapata Asli Daerah Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Besarnya PAD yang di peroleh oleh suatu daerah juga menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh oleh suatu daerah. Secara teori, PAD dan pertumbuhan ekonomi berhubunga positif. Untuk melihat hubungan tersebut dapat dilihat dari tabel perbandingan dibawah ini.

Tabel I.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan PAD Perkapita Dan Laju
Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Kab/Kota Di Sumatera Barat Dari Tahun
2009 – 2013.

NO	NAMA DAERAH	Laju Pertumbuhan PAD				Rata-rata	Laju Pertumbuhan Ekonomi				rata-rata
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	
1	Kab. Agam	-16%	63%	9%	19%	18,7%	5,7%	5,2%	6,8%	6,4%	6,0%
2	Kab. Dharmasraya	-1%	51%	13%	-31%	7,9%	10,7%	3,3%	6,0%	4,0%	6,0%
3	Kab. Pasaman Barat	-4%	16%	13%	10%	8,9%	6,7%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%
4	Kab. Solok Selatan	-37%	98%	47%	-3%	26,2%	6,7%	9,4%	-23,9%	6,4%	-0,3%
5	Kab. Limapuluh Kota	49%	36%	3%	31%	29,6%	4,5%	5,0%	5,2%	5,0%	4,9%
6	Kab. Solok	-22%	47%	-10%	18%	8,2%	6,3%	6,0%	6,3%	6,3%	6,2%
7	Kab. Pasaman	6%	58%	27%	-1%	22,5%	7,6%	9,9%	9,2%	9,2%	9,0%
8	Kab. Sijunjung	-13%	26%	15%	12%	10,1%	5,9%	6,0%	6,0%	6,1%	6,0%
9	Kab. Padang Pariaman	8%	9%	15%	35%	16,5%	3,8%	4,5%	5,4%	6,7%	5,1%
10	Kab. Tanah Datar	0%	39%	46%	-16%	17,4%	5,3%	5,5%	5,2%	5,5%	5,4%
11	Kab. Pesisir Selatan	151%	-1%	17%	-1%	41,5%	4,3%	4,2%	4,0%	5,7%	4,6%
12	Kab. Kep Mentawai	-12%	1%	28%	-13%	0,9%	3,5%	1,6%	2,7%	3,2%	2,8%
	Rata-rata Kabupaten	9%	37%	19%	5%	17%	5,9%	5,6%	3,3%	5,9%	5,2%
13	Kota Payakumbuh	3%	20%	12%	4%	9,7%	4,4%	-2,5%	5,9%	3,4%	2,8%
14	Kota Padang	39%	-1%	25%	23%	21,4%	4,6%	4,8%	5,8%	3,7%	4,7%
15	Kota Bukit Tinggi	-16%	23%	5%	18%	7,8%	2,5%	3,8%	4,4%	4,3%	3,7%
16	Kota Solok	-21%	26%	-3%	0%	0,2%	-0,1%	4,8%	4,5%	6,4%	3,9%
17	Kota Padang Panjang	45%	10%	5%	25%	21,3%	16,6%	4,5%	4,8%	4,6%	7,6%
18	Kota Pariaman	9%	13%	2%	15%	9,7%	3,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,4%
19	Kota Sawahlunto	-14%	51%	-5%	5%	9,3%	5,4%	3,9%	-2,5%	18,1%	6,2%
	Rata-rata Kota	6%	20%	6%	13%	11%	5,3%	3,4%	3,9%	6,4%	4,8%

Dari tabel I.2 diatas dapat dilihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, rata-rata laju pertumbuhan PAD kabupaten lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan PAD kota. Namun jika di lihat dari laju pertumbuhan ekonominya, kabupaten juga memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pula dibandingkan kabupaten.

Apabila dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan PAD dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten dari tahun 2009 sampai dengan 2013, terlihat bahwa pada tahun 2010 ke 2011 laju pertumbuhan PAD mengalami Peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonominya justru malah mengalami penurunan. Kemudian hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2012 ke 2013, laju pertumbuhan PAD kabupaten menurun tetapi laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Apabila dilihat dari wilayah kota, pada tahun 2010 ke 2011 laju pertumbuhan PAD kota mengalami peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. kemudian dari tahun 2011 ke 2012 justru malah sebaliknya. Pertumbuhan PAD menurun tetapi pertumbuhan ekonomi malah mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan baik kabupaten maupun kota belum memperlihatkan efektifitas dalam menggunakan pendapatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai teori yang dikemukakan oleh keynesian, dimana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa ketika pendapatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. fenomena yang terjadi di

kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan.

Selain pendapatan Asli Daerah, setiap daerah baik kabupaten maupun kota memiliki sumber pendapatan lain yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan celah fiskal antar daerah. Dana perimbangan terbagi atas tiga komponen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada dua komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Salah satu Tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah yaitu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dapat dimaknai bahwa semakin besar proporsi DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh oleh suatu daerah. Untuk melihat kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota di Sumatera Barat, maka di dapat dilihat dari tabel perbandingan dibawah ini :

Tabel I.3
Perbandingan Laju Pertumbuhan DAU Perkapita Dan Laju
Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Di Sumatera Barat
Dari Tahun 2009 – 2013.

NO	NAMA DAERAH	Laju Pertumbuhan DAU				Rata-rata	Laju Pertumbuhan Ekonomi				rata-rata
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	
1	Kab. Agam	-1%	11%	20%	12%	11%	5,7%	5,2%	6,8%	6,4%	6,0%
2	Kab. Dharmasraya	0%	12%	15%	7%	9%	10,7%	3,3%	6,0%	4,0%	6,0%
3	Kab. Pasaman Barat	40%	23%	3%	10%	19%	6,7%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%
4	Kab. Solok Selatan	3%	6%	18%	7%	9%	6,7%	9,4%	-23,9%	6,4%	-0,3%
5	Kab. Limapuluh Kota	1%	12%	17%	13%	11%	4,5%	5,0%	5,2%	5,0%	4,9%
6	Kab. Solok	16%	15%	8%	12%	13%	6,3%	6,0%	6,3%	6,3%	6,2%
7	Kab. Pasaman	4%	11%	17%	-20%	3%	7,6%	9,9%	9,2%	9,2%	9,0%
8	Kab. Sijunjung	7%	12%	16%	11%	12%	5,9%	6,0%	6,0%	6,1%	6,0%
9	Kab. Padang Pariaman	2%	10%	19%	12%	11%	3,8%	4,5%	5,4%	6,7%	5,1%
10	Kab. Tanah Datar	-22%	10%	69%	-27%	8%	5,3%	5,5%	5,2%	5,5%	5,4%
11	Kab. Pesisir Selatan	22%	7%	6%	15%	13%	4,3%	4,2%	4,0%	5,7%	4,6%
12	Kab. Kep Mentawai	-6%	11%	10%	24%	10%	3,5%	1,6%	2,7%	3,2%	2,8%
	Rata-rata Kabupaten	6%	12%	18%	7%	10%	5,9%	5,6%	3,3%	5,9%	5,2%
13	Kota Payakumbuh	-5%	4%	23%	10%	8%	4,4%	-2,5%	5,9%	3,4%	2,8%
14	Kota Padang	17%	0%	21%	12%	12%	4,6%	4,8%	5,8%	3,7%	4,7%
15	Kota Bukit Tinggi	-1%	11%	18%	9%	9%	2,5%	3,8%	4,4%	4,3%	3,7%
16	Kota Solok	7%	11%	17%	9%	11%	-0,1%	4,8%	4,5%	6,4%	3,9%
17	Kota Padang Panjang	34%	11%	11%	9%	16%	16,6%	4,5%	4,8%	4,6%	7,6%
18	Kota Pariaman	-7%	10%	13%	12%	7%	3,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,4%
19	Kota Sawahlunto	-24%	10%	18%	45%	12%	5,4%	3,9%	-2,5%	18,1%	6,2%
	Rata-rata Kota	3%	8%	17%	15%	11%	5,3%	3,4%	3,9%	6,4%	4,8%

Dari data tabel 1.3 dapat di lihat bahwa, rata-rata laju pertumbuhan DAU kabupaten dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar 10% dan laju pertumbuhan ekonominya sebesar 5,2%. Jika dilihat dari wilayah kota diperoleh rata-rata laju pertumbuhan DAU yaitu sebesar 11% dan laju pertumbuhan ekonominya sebesar 4,8%. Dari hasil perbandingan tersebut terdapat sebuah permasalahan dimana kabupaten yang memiliki laju

pertumbuhan DAU yang lebih rendah dari pada laju pertumbuhan DAU kota, justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara kota yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan DAU yang tinggi justru malah mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang rendah. Seharusnya semakin besar daerah yang memiliki pertumbuhan DAU yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh juga akan tinggi pula. Adanya permasalahan ini, menandai bahwa harapan pemerintah pusat terhadap pemerintah pusat belum memberikan hasil yang semestinya.

Apabila dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan DAU dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, baik pada pemerintah kabupaten maupun kota, penurunan dan kenaikan laju pertumbuhan DAU tidak memberikan arah yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Artinya dalam beberapa tahun terakhir tersebut ketika pertumbuhan DAU meningkat tetapi pertumbuhan ekonomi malah mengalami penurunan. permasalahan tersebut terjadi pada tahun 2010 ke 2012 dan tahun 2012 ke tahun 2013 pada pemerintah kabupaten. Hal yang serupa juga dialami oleh pemerintah kota yaitu pada tahun 2012 ke 2013.

Faktor yang menyebabkan permasalahan ini terjadi yaitu karena pemerintah pusat memberikan wewenang seutuhnya kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana tersebut sehingga pemerintah daerah secara leluasa menggunakannya pada pembiayaan yang di anggap tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut pada belanja operasional yang cukup besar sehingga mengakibatkan

pengalokasian terhadap belanja pembangunan relatif kecil. Padahal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan dana tersebut terhadap belanja pembangunan yang relatif besar.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan khusus suatu daerah. kegiatan khusus suatu daerah yang dimaksud yaitu untuk membiayai sarana prasarana pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya. Berikut merupakan data perkembangan DAK seluruh kabupaten dan kota di Sumatera barat.

Tabel I.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan DAK Perkapita Dan Laju
Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Di Sumatera Barat
Dari Tahun 2009 – 2013.

NO	NAMA DAERAH	Laju Pertumbuhan DAU				Rata-rata	Laju Pertumbuhan Ekonomi				rata-rata
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	
1	Kab. Agam	-4%	-12%	50%	-12%	5,5%	5,7%	5,2%	6,8%	6,4%	6,0%
2	Kab. Dharmasraya	-10%	-1%	-5%	41%	6,1%	10,7%	3,3%	6,0%	4,0%	6,0%
3	Kab. Pasaman Barat	-8%	-14%	19%	21%	4,6%	6,7%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%
4	Kab. Solok Selatan	-51%	-2%	19%	31%	-0,8%	6,7%	9,4%	-23,9%	6,4%	-0,3%
5	Kab. Limapuluh Kota	-35%	-6%	-6%	14%	-8,0%	4,5%	5,0%	5,2%	5,0%	4,9%
6	Kab. Solok	9%	2%	4%	29%	11,3%	6,3%	6,0%	6,3%	6,3%	6,2%
7	Kab. Pasaman	-17%	10%	7%	-33%	-8,1%	7,6%	9,9%	9,2%	9,2%	9,0%
8	Kab. Sijunjung	-13%	30%	1%	55%	17,9%	5,9%	6,0%	6,0%	6,1%	6,0%
9	Kab. Padang Pariaman	-21%	27%	-5%	50%	12,9%	3,8%	4,5%	5,4%	6,7%	5,1%
10	Kab. Tanah Datar	1%	2%	41%	-24%	5,0%	5,3%	5,5%	5,2%	5,5%	5,4%
11	Kab. Pesisir Selatan	13%	7%	0%	4%	6,1%	4,3%	4,2%	4,0%	5,7%	4,6%
12	Kab. Kep Mentawai	-40%	42%	19%	31%	12,9%	3,5%	1,6%	2,7%	3,2%	2,8%

	Rata-rata Kab.	-15%	7%	12%	17%	5,5%	5,9%	5,6%	3,3%	5,9%	5,2%
13	Kota Payakumbuh	-70%	77%	19%	33%	14,6%	4,4%	-2,5%	5,9%	3,4%	2,8%
14	Kota Padang	-37%	102%	19%	24%	27,0%	4,6%	4,8%	5,8%	3,7%	4,7%
15	Kota Bukit Tinggi	-33%	-5%	-13%	40%	-2,6%	2,5%	3,8%	4,4%	4,3%	3,7%
16	Kota Solok	12%	3%	63%	2%	20,1%	-0,1%	4,8%	4,5%	6,4%	3,9%
17	Kota Padang Panjang	84%	-65%	37%	-32%	6,1%	16,6%	4,5%	4,8%	4,6%	7,6%
18	Kota Pariaman	-61%	13%	22%	-86%	-28,4%	3,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,4%
19	Kota Sawahlunto	17%	35%	-23%	47%	19,2%	5,4%	3,9%	-2,5%	18,1%	6,2%
	Rata-rata kota	-13%	23%	18%	4%	8%	5,3%	3,4%	3,9%	6,4%	4,8%

Dari tabel I.4 terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata-rata laju pertumbuhan DAK kabupaten yaitu sebesar 5,5% dan rata-rata laju pertumbuhan ekonominya yaitu sebesar 5,2%. Jika di dibandingkan dengan laju pertumbuhan DAK Kota. Kota memiliki rata-rata laju pertumbuhan DAK sebesar 8%, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonominya yaitu sebesar 4,8%.

Dari data diatas terdapat permasalahan yaitu kota yang memiliki laju pertumbuhan DAK yang tinggi dari pada kabupatentetapi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dari pada kabupaten. Dan begitu juga sebaliknya, kabupaten yang mengalami laju pertumbuhan DAK yang rendah justru malah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daerah yang memiliki laju pertumbuhan DAK yang tiinggi, seharusnya laju pertubuhan ekonomi yang tinggi pula. Fenomena yang terjadi di kabupaten maupun kota disumatera barat justru terbalik.

Jika dilihat dari data perkembangan laju pertumbuhan DAK dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, terlihat bahwa laju pertumbuhan DAK cenderung berfluktuasi dan tidak stabil. Hal ini ditandai dengan sebagian

kabupaten dan kota memperoleh pertumbuhan DAK yang tinggi. Sedangkan sebagian kota lainnya memperoleh pertumbuhan yang rendah. Faktor yang menyebabkan ketimpangan pertumbuhan DAK antar daerah yaitu karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pula. Daerah yang membutuhkan pembangunan yang cukup tinggi akan memperoleh DAK yang tinggi pula, dan begitu juga sebaliknya.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian, diantaranya yaitu Afrisa Ayu, et.al (2012), memperoleh hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pipin Prasetyo (2011), memperoleh hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan DAK berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan Atsushi Limi (2004), memperoleh hasil bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Sumatera Barat ”***.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat?
4. Seberapa besar pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pertumbuhan ekonomi Secara bersama-sama di Kab/Kota Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi :

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam tentang pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat.
2. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat yang menjadi lokasi penelitian, untuk dapat menganalisis Pertumbuhan Ekonominya dalam hal ini pengaruhnya dengan PAD, DAU, dan DAK.
3. Bagi akademis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian sejenis

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw (2008: 284), pertumbuhan ekonomi merupakan seluruh output yang dihasilkan oleh masyarakat didalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Secara anggregat pertumbuhan ekonomi dapat di formulasi sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

Y : Pertumbuhan Ekonomi

C : Konsumsi

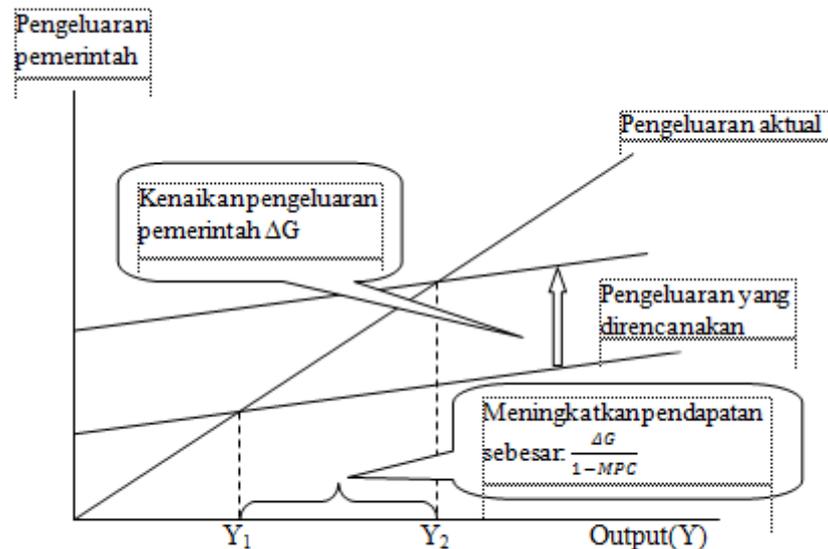
I : Investasai

G : Pengeluaran pemerintah

X-M : Nett ekspor

Hal ini merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dimana pengeluaran pemerintah bersumber dari besarnya pendapatan yang di terima oleh suatu negara.

Teori Keynesian menyatakan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini diilustrasikan dengan pemodelan yang disebut perpotongan Keynesian, seperti yang digambarkan di bawah ini.



Gambar 1: Perpotongan Keynesian

Kenaikan belanja pemerintah sebesar ΔG akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari Y_1 ke Y_2 . Jika kita memasukkan unsur daerah dalam teori keynesian ini, maka dapat di maknai bahwa pada saat pendapatan suatu daerah meningkat baik dari PAD maupun dana perimbangan, secara otomatis pengeluaran saat itu juga meningkat sehingga dengan meningkatnya pengeluaran maka pertumbuhan akan meningkat pula. Karena fungsi dari pendapatan yaitu untuk membelanjai kegiatan pembangunan suatu daerah.

Menurut Harrod-Domar dalam Mankiw (2008: 285), setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan dan material) yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio output modal tersebut.

Menurut teori pertumbuhan Solow-Swan dalam Mankiw (2008: 287), pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pekerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan.

Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data produk domestik bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto Untuk daerah (PDRB) pada nilai akhir pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan teori Tiebout dalam (Sumarsono dan Hadi Utomo,2009) menyatakan bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari teori Tiebout tersebut dapat dimaknai bahwa lahirnya desentralisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga berujung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Salah satu tujuan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat.

Desentralisasi terfokus pada tingkat kabupaten dan kota. Kedua pemerintahan tersebut berada pada level ketiga setelah pemerintah pusat dan provinsi. Beberapa pengamat menyarankan bahwa desentralisasi harus dilaksanakan pada tingkat provinsi karena provinsi dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani seluruh tanggung jawab yang dilimpahkan dari pada kabupaten dan kota. Walaupun demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah pusat merasa tidak diuntungkan secara politis jika harus membentuk pemerintahan otonom provinsi yang kuat. Alasannya adalah akan menjadi potensi yang disintegrasi yang semakin kuat (Arsyad,2004).

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi Simanjuntak (2001) dalam Pujiati (2008): (1) Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah (2) Tidak dapat dipraktikkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia (3) Pengetahuan lokal (*local knowledge*), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Menurut pasal 14 UU No. 32 tahun 2004, Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;

- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pada hakekatnya, terdapat tiga prinsip dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

- a. Desentralisasi, yaitu adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga otonomi lebih dititikberatkan pada daerah tersebut.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

c. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dari beberapa uraian di atas, desentralisasi fiskal adalah sebagai konsekuensi dari adanya pelimpahan wewenang sehingga daerah juga lebih leluasa untuk mendapatkan anggaran lebih untuk melaksanakan tugas desentralisasi dalam meningkatkan pertumbuhan daerah masing-masing. Pemerintah daerah dalam meningkatkan anggaran bisa melalui optimalisasi penerimaan daerah sendiri dan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Berikut merupakan sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya :

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ahmad Yani (2008: 44), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil pula usaha pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka berdikari (Self Suporting) dari segi keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satunya yang paling nyata adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan PAD yang ada (Evasanti 2005)

Jadi semakin besar komposisi penerimaan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi ketika komposisi penerimaan PAD lebih kecil, maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan PAD yaitu kelancaran pembangunan. Pembangunan ini meliputi pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti : sarana olah raga, pasar, mesjid dan lain sebagainya.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan PAD adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dari pengertian diatas maka PAD dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan + Lain-lain Pendapatan yang Sah$$

1. Pajak Daerah

Menurut Ahmad yani (2008: 52), Pajak Daerah adalah sumber keuangan pokok bagi daerah di samping sumber keuangan lainnya. Pajak daerah pada hakikatnya berfungsi sebagai sumber penerimaan juga menjadi instrumen kebijakan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Jadi pajak mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai penerimaan di satu sisi dan sebagai instrumen kebijakan disisi lain.

Menurut Mardismo (2002: 71), mengatakan bahwa pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk smembiayai rumah tangganya.

Menurut Hamdani Aini dalam wandira (2013), menyatakan bahwa pajak daerah ialah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik.

Dari beberapa pengertian diatas maka pajak daerah dapat di ciri-cirikan sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah tetapi tarifnya di tetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Pajak yang dipungut daerah untuk membiayai rumah tangganya.
- c. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya di bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak telah di tetapkan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten dan kota di beri peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak lainnya selain yang telah di tetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi bagi Kab/Kota adalah :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kab/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di Kab/Kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi atau objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak daerah di bedakan menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten dan Kota. Jenis pajak Provinsi terdiri sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemamfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sementara pajak kabupaten dan kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- b. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- f. Pajak parkir

Adapun dasar-dasar pengenaan pajak daerah yang terdiri dari pajak Provinsi dan pajak Kab/Kota yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Provinsi
 - 1). Tarif pajak kendaraan bermotor.
 - 2). Tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

- 3). Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4). Tarif pajak pengambilan dan pemamfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah nilai perolehan tanah. Tarif untuk air bawah tanah sebesar 20% dan air permukaan sebesar 10%.

b. Pajak Kabupaten dan Kota

- 1) Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- 2) Tarif pajak restoran paling tinggi di tetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- 3) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% dari pembayaran yang dilakukan.
- 4) Tarif pajak reklame di tetapkan paling tinggi 25% dari nilai sewa reklame.
- 5) Tarif pajak penerangan jalan di tetapkan paling tinggi 10% dari nilai jual tenaga listrik.
- 6) Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C paling tinggi 20% dari nilai jual hasil penggalian.
- 7) Tarif pengenaan pajak parkir yaitu paling tinggi 20% dari jumlah pembayaran tempat parkir.

2. Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2008: 63), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang kusus di sediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang

pribadi atau badan yang ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah juga merupakan bagian dari pendapatan daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten dan Kota diberi peluang dalam menggali potensi-potensi sumber-sumber keuangannya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Retribusi daerah terbagi atas tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi jasa umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil yang akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar adalah pengutan yang diperoleh dari fasilitas pasar seperti peralatan pasar, los pasar dll. Tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan milik negara.

- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 - j. Retribusi pengujian kapal perikanan
- b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah dengan mengatur prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelanggan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat kusus parkir
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrasahan/villa
 - g. Retribusi penyedotan kakus
 - h. Retribusi rumah potong hewan
 - i. retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - k. Retribusi penyebrangan di atas air
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c). Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

3. Hasil Pengolahan Kekayaan Yang Dipisahkan

Menurut Ahmad Yani (2008: 73), Hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini mencakup :

- 1). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Negara (BUMN)
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah

Menurut Ahmad Yani (2008: 74), Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

- 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2). Jasa giro
- 3). Pendapatan bunga
- 4). Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- 5). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan oleh pengadaan barang dan jasa daerah
- 6). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7). Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8). Penerimaan denda pajak
- 9). Penerimaan denda retribusi
- 10). Penerimaan atas eksekusi atas jaminan

- 11). Penerimaan dari pengembalian Dm
- 13). Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14). Penerimaan dari angsuran/cicilan penjualan

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Dana alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu (Ahmad Yani 2008: 142)

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan alokasi dasar adalah alokasi sejumlah dana yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negative dan nilai negative tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima

DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatife dan nilai negatife tersebut lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Hasil perhitungan DAU per provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Rincian DAU untuk masing-masing daerah disampaikan oleh DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah). Penyaluran DAU pada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan setiap bulan masing-masing sebesar $1/12$ dari DAU daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 pengalokasian DAU ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relative kecil. Sebaliknya untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relative besar (Subchan dan Sudarman, 2007).

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD bahwa penggunaan Dana Perimbangan DAU agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji & tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi & pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar & pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di Indonesia yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu (Ahmad Yani 2008: 165). DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah :

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan dikawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer.

- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau bersifat prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dalam keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai oleh DAK ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait setelah berkonsultasi dengan DPOD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam hal ini terdapat beberapa sektor/kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh DAK yaitu : biaya administrasi, biaya penyimpanan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai bagian DAK untuk membiayai kegiatan reboisasi oleh daerah penghasil.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada menteri teknis oleh daerah tersebut dapat berbentuk rencana suatu proyek

atau kegiatan tertentu, atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber kebijakan instansi teknis terkait, kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian Dana Reboisasi.

Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan APBD, kecuali pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari Dana Reboisasi. Pengelolaan DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Menteri teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 162 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional dan untuk membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah diteliti oleh Pipin Presetyono (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Dan Perimbangan Dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Pulau Jawa”. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara DAK berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wawan Prasetya (2011), dengan judul “Analisis Pengaruh Dana PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Se-Jawa Bali. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi DAK berpengaruh tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Friskam Sihite (2010), memperoleh hasil bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh Positif terhadap pertumbuhan Ekonomi.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah faktor yang menentukan besarnya anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan suatu daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. Jadi semakin besar PAD suatu daerah maka semakin besar pula daerah tersebut akan memperoleh pertumbuhannya. Dalam penelitian Wawan Prasetyo (2010), menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh Positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar pembentuk anggaran pemerintah daerah, tujuan dari transfer DAU adalah untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Dengan adanya transfer DAU ini, daerah bisa lebih fokus terhadap penggunaan PAD yang dimiliki untuk membiayai kegiatan pembangunannya, guna menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun PAD, maka daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian Holtz-Eakin, et.al (1994) menunjukkan adanya keterkaitan erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan pertumbuhan ekonomi. Prakosa (2004) serta Harianto dan adi (2007) memberikan fakta empirik dimana DAU mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya dana DAU akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

3. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus.

Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

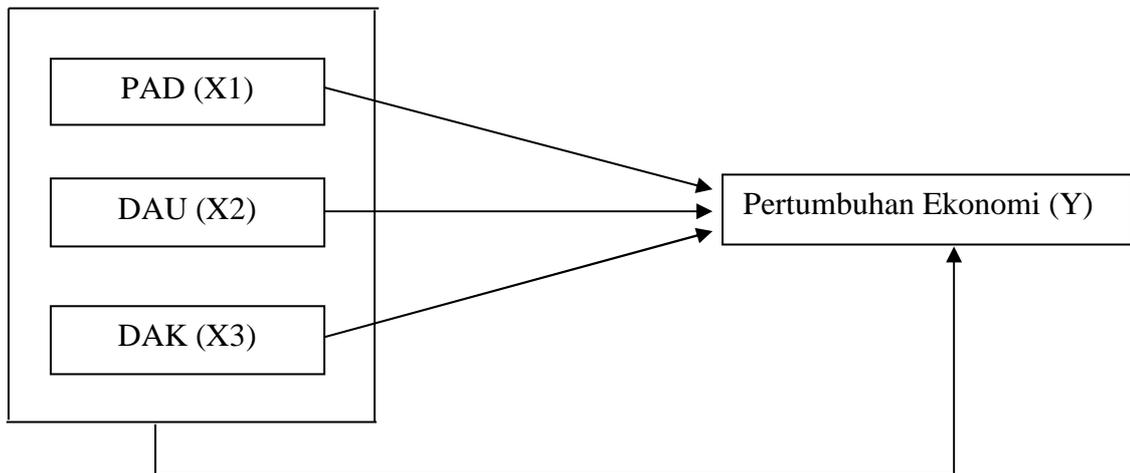
Dengan adanya perbaikan dibidang infrastruksur, prasarana pemerintah maupun pada bidang lainnya maka hal ini akan mendorong investasi pada suatu daerah sehingga kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa pada suatu daerah akan meningkat. Dengan meningkatnya produksi barang dan jasa pada suatu daerah maka dapat maknai bahwa daerah tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonominya.

D. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan kesimpulan adanya pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap

Pertumbuhan Ekonomi daerah, maka penulis membuat kerangka konseptual atas penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2
Kerangka Konseptual

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan otonomi daerahnya. Semakin besar pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatannya maka dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan yang besar pula untuk melaksanakan kegiatan pembangunannya sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut.

PAD merupakan Sumber pendapatan utama daerah yang bersumber dari APBD. Sementara DAU dan DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya .

Bantuan dari pemerintah pusat ini ditujukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan suatu daerah. Semakin besar bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Baik PAD maupun DAU dan DAK memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka biaya yang akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya semakin tinggi pula sehingga pertumbuhan yang akan dicapai juga akan tinggi.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan gambaran sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Husein Umar, 2005: 10).

Berdasarkan kerangka konseptual dan uraian teoritis tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

b. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$H_a: \beta_2 \neq 0$$

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 \neq 0$$

- d. PAD, DAU dan DAK berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bedasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota dan berhubungan positif. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota Sumatera Barat.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota Sumatera Barat. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan menyebabkan menurunnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

B. SARAN

Dari simpulan diatas dapat penulis kemukakan beberapa saran yang patut diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait, antara lain :

1. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaannya terutama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD merupakan sumber pembiayaan utama yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
2. Sehubungan dengan adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat, maka disarankan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat supaya lebih memperhatikan penggunaan dana tersebut, agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut tepat sasaran dan sesuai tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta
- Damador, Gujarati. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Evasanti, Triurlini. 2006. *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber PAD Kota Batu*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Hirawan, S.B. 1993. *Pengembangan Pola Bantuan Daerah dalam Repelita VI : Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*. Jumal Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
- Iimi , Atsushi. 2004. *Decentralisation and Economic Growth Revisited : An Empirical Note*.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang penganggaran asset tetap*.
- Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 *Tentang pembagian DAU*.
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 *Tentang penyusunan APBD*.
- Prasetyono, Pipin. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi kasus seluruh kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2001-2009)*.
- Presetya, Wawan. 2011. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Se-Jawa Bali Tahun 2006-2009)*
- Umar, Husein. 2005. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.